

PKM Bagi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang

Ahwy Oktradiksa¹, Kanthi Pamungkas Sari², Irham Nugroho³

¹²³Program Studi PGMI, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang

¹ahwy@ummgl.ac.id

²kpamungkassari@ummgl.ac.id

³irham_nugroho@ummgl.ac.id

ABSTRAK

MIM Jagalan (1950) dan MIM Jumoyo (1968) merupakan Lembaga Pendidikan Dasar di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Meski sudah setengah abad didirikan, namun sampai saat ini masih mengalami sejumlah kendala, di antaranya adalah 1) rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga berdampak pada pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas; 2) adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar (MI dan SD) di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang; 3) Kondisi obyektif dari guru dan sumber daya manusia dan sumber daya media pembelajaran berupa Alat Peraga Edukatif (APE) sehingga berdampak pada keterbatasan dalam mendukung proses pembelajaran berkualitas; 4) Minimnya dukungan *stakeholders* madrasah dalam pengembangan madrasah baik secara moril maupun materiil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan mutu madrasah menuju madrasah dengan proses pendidikan yang berkualitas. Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah model pemberdayaan masyarakat partisipatif *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Metode tersebut dibagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan Pendampingan, dan penyusunan laporan. Tahap persiapan dimulai perijinan, persiapan melalui *Forum Group Discussion (FGD)* pembagian tugas pelaksana dengan mitra. Tahap Pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi, evaluasi SNP, pendampingan mutu dokumen, pendampingan pembuatan APE, Pelatihan strategi dan metode pembelajaran, Tahap terakhir penyusunan laporan akhir.

Kata kunci: Program Kemitraan Masyarakat, Madrasah Ibtidaiyah

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terintegrasi ke dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana ketentuan SKB 2 Menteri 1984. Sebagai bagian integral alam sistem pendidikan nasional tentunya madrasah memiliki potensi yang strategis untuk ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa.

Meningkatkan mutu Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan, yaitu dengan pemberdayaan madrasah (*schools empowerment*). Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah sistem pendidikan bermutu kepada masyarakat yang ditunjang oleh tiga aspek, yaitu manajemen yang rapi, tenaga pendidik (guru) profesional, serta dana dan fasilitas pendidikan yang memadai. MI yang dikelola dengan tertib dan rapi akan memiliki kesempatan besar untuk menjadi sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan dibutuhkan oleh

masyarakat di era globalisasi yang begitu banyak diwarnai oleh paham materialistik. Jika ketiga aspek tersebut di atas dimiliki, MI akan dapat mencapai standar atau patokan yang dijadikan patokan, yaitu standar nasional pendidikan.

Namun dalam kenyataannya, pengembangan mutu madrasah di daerah dihadapkan pada masalah-masalah yang fundamental seperti 1) rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga berdampak pada pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas; 2) adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar) di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang; 3) Kondisi obyektif dari guru dan sumber daya manusia dan sumber daya media pembelajaran berupa Alat Peraga Edukatif (APE) sehingga berdampak pada keterbatasan dalam mendukung proses pembelajaran berkualitas; 4)

Minimnya dukungan *stakeholders* madrasah dalam pengembangan madrasah baik secara moril maupun materiil.

Kondisi tersebut juga dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan madrasah baik negeri maupun swasta di daerah Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang memiliki 310 MINegeri dan Swasta yang tersebar di 21 kecamatan. Rata-rata setiap kecamatan memiliki 14 sampai 15 MI. Menurut data yang diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Madrasah dan Sekolah (*BANSM.or.id*) tahun 2015, madrasah yang memiliki akreditasi peringkat A ada 7 MI, peringkat B sejumlah 60 MI, dan yang memiliki peringkat C ada 21 MI. Ini berarti sebagian besar MI belum terakreditasi. Bagi MI yang sudah terakreditasipun bukan berarti tidak memiliki permasalahan. Mereka masih cukup rapuh apabila tidak diberikan penguatan kelembagaan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, utamanya dalam pengembangan mutu madrasah. Jika hal tersebut tidak diupayakan maka yang paling besar kena imbasnya adalah para peserta didik.

MIMuhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo di Kecamatan Salam. Keduanya berdiri sudah terbilang lama, karena semuanya lahir lebih dari dua dasa warsa yang lalu. Masing-masing sudah terakreditasi oleh BANSM. MIM Jagalan telah terakreditasi dengan peringkat A dan saat ini dipimpin oleh Bapak Muh Nur Huda, S.Pd.I. MIMuhammadiyah Jagalan berdiri di atas tanah seluas 600 m², dengan 9 orang guru, dan 109 siswa didik. Selanjutnya mitra 2 sudah terakreditasi dengan peringkat B dan dipimpin oleh Ibu Riastuti Martitaningsih, S.Pd.I., yang berdiri di atas tanah seluas 660m², dengan 9 orang guru dan 65 peserta didik. Meskipun kedua MIMuhammadiyah tersebut sudah terakreditasi, namun belum menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Kondisi tersebut disebabkan antara lain 1) rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga berdampak pada pelaksanaan proses pendidikan yang berkualitas; 2) adanya kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar) di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang; 3) Kondisi obyektif dari guru dan sumber daya manusia dan sumber daya media pembelajaran berupa Alat Peraga Edukatif (APE) sehingga berdampak pada keterbatasan dalam mendukung proses pembelajaran berkualitas; 4) Minimnya dukungan

stakeholders madrasah dalam pengembangan madrasah baik secara moril maupun materiil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan pendampingan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat terhadap kedua mitra untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Permasalahan kedua mitra tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Pemahaman tentang SNP

Sejak keluarnya Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2005 maupun tahun 2009 tentang SNP sampai saat ini pihak pengelola madrasah belum pernah mendapatkan informasi yang detail dan menyeluruh tentang SNP. Hal ini terjadi karena belum pernah ada sosialisasi yang detail dan menyeluruh tentang SNP dari pihak-pihak terkait. Mitra sebenarnya sangat membutuhkan informasi tersebut agar program kerja madrasah yang tersusun dapat lebih mengarah pada pencapaian kualitas pendidikan yang diharapkan oleh regulasi.

b. Pengembangan mutu madrasah

Pengembangan mutu pendidikan sudah diupayakan oleh kedua mitra, dengan melalui program kerja tahunan yang disusun oleh pengelola madrasah bersama komite. Namun dalam perjalanan proses realisasinya sampai saat ini terus mengalami kendala-kendala yang berarti. Selama ini baik mitra 1 maupun mitra 2 menyusun program kerja tahunan masih dengan cara yang konvensional menurut tradisi yang ada. Belum berangkat dari permasalahan yang paling mendasar atau akar masalah yang sesungguhnya. Karena keterbatasan pemahaman tentang SNP, maka program kerja tersebut belum mengarah pada SNP. Dokumen mutu yang ada masih sangat minim disusun bukan untuk kepentingan yang strategis bagi pengembangan madrasah sehingga hanya sekedar memenuhi administrasi.

c. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat

Secara kuantitas guru yang terlibat dalam proses pembelajaran sudah memadai, namun secara kualitas jumlah guru pada mitra 1 maupun mitra 2 masih 60% yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang linier sebagai guru kelas. Bahkan ada yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang bukan pendidikan. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan metode pembelajaran dan penguasaan materi yang harus disampaikan kepada peserta didik.

Selain itu, masing-masing madrasah belum memiliki tenaga kependidikan yang menangani administrasi secara khusus. Pekerjaan administrasi menjadi tanggungjawab pekerjaan semua guru. Dengan kata lain guru memiliki kewajiban sebagai seorang pendidik merangkap sebagai tenaga administrasi, dengan beban tugas yang sudah dibagi oleh Kepala MI.

d. Dukungan dari para pemangku kepentingan MI Muhammadiyah Jagalan dan MIMuhammadiyah Jumoyo adalah madrasah swasta yang terletak di wilayah pedesaan. Sebagian besar dari orangtua peserta didik memiliki matapecaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan sebagian kecil adalah pegawai swasta yang bertempat tinggal di wilayah sekitar. Pembebanan uang SPP dilakukan secara subsidi silang antara peserta didik dari keluarga yang tergolong mampu dengan yang kurang mampu. MI belum memiliki sumber pemasukan untuk operasional madrasah secara rutin selain dari bantuan pemerintah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan donatur yang jumlahnya setiap bulannya tidak tentu. Kondisi yang demikian ini menjadikan kemandirian dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan juga sangat terbatas.

e. Permasalahan lain yaitu dukungan dari *stakeholders* dalam pengembangan madrasah nampak belum memadai sebagaimana yang diharapkan. Mitra 1 dan mitra 2 hanya memiliki 6 lokal ruang kelas, 1 ruang guru, dan 1 ruang kepala madrasah yang digabung dengan ruang tamu. Belum memiliki perpustakaan atau ruang baca, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), laboratorium dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Adanya kondisi obyektif madrasah yang demikian mendorong pihak pengelola MI Muhammadiyah Jagalan dan MIMuhammadiyah Jumoyobermaksud untuk mengadakan perbaikan madrasah agar benar-benar memiliki mutu standar pendidikan nasional kepada tim untuk membantu dan mendampingi.

METODE KEGIATAN

Metode yang akan dipakai dalam kegiatan ini adalah model pemberdayaan masyarakat partisipatif yaitu *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode PRA dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa yang mempunyai atau menghadapi masalah adalah

mitra, oleh karena itu keterlibatan mitra dalam penentuan pemecahan masalah dan penyelesaiannya sangat diperlukan. Metode tersebut dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan. Rinciannya sebagai berikut:

Tahap persiapan, meliputi:

1. Memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magelang melalui Kasie Pendidikan Madrasah
2. Menyampaikan ijin kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Magelang melalui Kasie Pendidikan Madrasah, yang wilayahnya digunakan sebagai lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat ini.
3. Menyiapkan teknologi yang akan diterapkan kepada sasaran mitra.
4. Menyusun jadwal kegiatan dan melakukan pembagian tugas di antara anggota tim sebagaimana berdasarkan kompetensi masing-masing.

Tahap pelaksanaan, meliputi:

Kegiatan 1 :

1. Sosialisasi dan diskusi tentang SNP kepada pengelola MI yang terdiri dari Kepala Madrasah, Guru, Komite Madrasah, dan *Stakeholder*.
2. Evaluasi atas peningkatan pemahaman peserta tentang SNP

Kegiatan 2 :

1. Sosialisasi tentang dokumen mutu MI kepada pengelola MI
2. Pendampingan penyusunan dokumen mutu MI diantaranya : *evaluasi diri /pemetaan masalah madrasah* dengan menggunakan analisis SWOT yang melibatkan seluruh pengelola dan Komite Madrasah beserta Kasie Madrasah Kemenag Kabupaten Magelang; Rencana Program Kerja Madrasah; Dokumen-Dokumen Mutu yang belum dimiliki madrasah, jenis atau nama dokumen yang akan disusun setelah mendapatkan informasi dari pemetaan masalah dan rencana program kerja.

Kegiatan 3 :

1. Pelatihan pengembangan metode dan media pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif bagi guru. Hal ini bertujuan untuk merespon masalah guru yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang linier sebagai guru kelas, dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan akan berimbas pada peningkatan kualitas lulusan.

2. Pelatihan penggunaan berbagai macam dan karakteristik media pembelajaran bagi guru. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena proses pembelajaran yang saat ini didominasi menggunakan cara yang konvensional dan menggunakan media pembelajaran yang sangat terbatas.
3. Evaluasi peningkatan keterampilan guru dalam menggunakan metode dan media pembelajaran.

Kegiatan 4 :

1. Memetakan kemungkinan peluang kerjasama dengan pihak luar yang dapat dibangun dan ditindaklanjuti guna pengembangan mutu madrasah yang lebih baik.
2. Menyusun beberapa naskah kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan menindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.

Tahap Pendampingan

Pendampingan dilakukan hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Kegiatan pendampingan yang akan dilakukan adalah pengembangan mutu madrasah dengan prioritas mutu pengajaran, mutu media pembelajaran dan mutu manajemen madrasah sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Tahap Penyusunan Laporan dan publikasi, meliputi

1. Penyusunan laporan kemajuan, minimal 75 % selesai dalam waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Penyusunan laporan akhir beserta seluruh instrument pelaporan dilakukan setelah seluruh kegiatan pengabdian pada masyarakat ini selesai yaitu pada bulan kedelapan.

Metode yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode pemberdayaan masyarakat partisipatif dengan model *Participatory Rural Appraisal* yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan.

Tahap-tahap dari model PRA ini adalah:

1. Pengenalan masalah/kebutuhan dan potensi serta kesadaran; Dalam tahap ini dilakukan identifikasi terhadap berbagai

permasalahan yang dihadapi MI Muhammadiyah Jagalanda dan MIMuhammadiyah Jumoyomitra terutama aspek pengembangan mutu madrasah.

2. Perumusan masalah dan penetapan prioritas; Masalah-masalah yang sudah teridentifikasi selanjutnya dirangking urut dari masalah yang paling berat hingga ke masalah yang ringan. Permasalahan utama yang dihadapi MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo adalah pemahaman SNP, pengembangan mutu, kualitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan guna mewujudkan madrasah unggul.
3. Identifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah/pengembangan gagasan; a) Sosialisasi dan Diskusi tentang SNP kepada pengelola Madrasah; Kepala Madrasah, Guru, Komite Madrasah, *Stakeholder*, dan Alumni sehingga berdampak pada proses pendidikan yang berkualitas. b) Workshop Pelatihan pengembangan metode pembelajaran untuk pengembangan rasa profesional guru. c) Pelatihan penggunaan media pembelajaran berupa Alat Peraga Edukatif (APE) bagi guru. d) Penyusunan Naskah kerjasama dengan pihak luar (Kementerian Agama Kasie Pendidikan Madrasah Kabupaten Magelang, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Magelang, *Stakeholder*/Alumni dan Donatur Pemangku Kepentingan.
4. Diskusi antara tim pengusul dengan MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo mitrajuga diterapkan pada penentuan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sudah diprioritaskan, termasuk penentuan jadwal kegiatan, tempat pelaksanaan, dan peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.
5. Pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat; Setelah dilakukan pencarian terhadap sejumlah alternatif pemecahan masalah yang dihadapi MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo mitra, selanjutnya dilakukan pemilihan dari alternatif-alternatif tersebut model pemecahan masalah yang paling optimal. Penentuan ini selain meminta pendapat dari MI Muhammadiyah Jumoyo dan MI Muhammadiyah Jagalan mitra, juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari tim pengusul berdasarkan waktu pelaksanaan, tenaga, dana, dan kemudahan teknologi tepat guna yang akan digunakan.

6. Perencanaan penerapan gagasan dan penyajian rencana kegiatan; Tahap ini disusun oleh tim pengusul dengan tetap melibatkan MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo mitra, sehingga pelaksanaannya tertib dan lancar serta dapat optimal hasilnya. Kegiatan direncanakan selama 8 bulan.
7. Pelaksanaan pengorganisasian; Setelah tahap sebelumnya selesai dilakukan, maka tahap berikutnya adalah melakukan pembagian tugas di antara tim pengusul sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.
8. Pemantauan dan pengarahan kegiatan; Selama kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan, maka pemantauan selalu dilakukan agar kegiatan terarah dan mampu mencapai tujuan secara optimal.
9. Evaluasi dan rencana tindak lanjut; Evaluasi dilakukan setelah seluruh kegiatan pengabdian selesai dilakukan guna menentukan rencana tindak lanjutnya.

Partisipasi MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo mitra dalam pelaksanaan program adalah tidak semua permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan bantuan dari tim pelaksana. Misalnya pihak mitra harus mempersiapkan dokumen analisis SWOT; Rencana Program Kerja Madrasah; Dokumen-Dokumen Mutu yang belum dimiliki, identifikasi daftar alumni sebagai donatur yang bisa dibuat untuk peningkatan kerjasama madrasah yang bertujuan untuk melengkapi dan merencanakan program prioritas untuk pengembangan mutu madrasah.

Evaluasi dilakukan setiap 1 masalah yang dihadapi MI Muhammadiyah Jagalan dan MI Muhammadiyah Jumoyo mitra diselesaikan. Evaluasi tersebut meliputi 1) setelah sosialisasi standar nasional pendidikan oleh pakar selesai kemudian mitra membuat analisis SWOT, maka dilakukan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitasnya, 2) Sosialisasi tentang dokumen mutu MI kepada pengelola MI Peningkatan kualitas SDM; a) Pelatihan pengembangan metode pembelajaran bagi guru, b) Pelatihan penggunaan media pembelajaran bagi guru akan dilakukan evaluasi terhadap *progres* berupa komitmen mitra dalam pengembangan mutu madrasah.

HASIL & PEMBAHASAN

Program 1 : Forum Group Discussion

Kegiatan awal yang dilakukan adalah, melakukan koordinasi dengan pihak MI Muhammadiyah Jagalan dan Jumoyo Kabupaten Magelang, dengan membawa surat tugas Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Megalang Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Direktorat Research Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset Teknologi Perguruan Tinggi (Kemristekdikti tahun 2018) melalui pengembangan mutu madrasah dengan Program SNP, APE, Workshop Strategi Pembelajaran bagi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Magelang. Pada pelaksanaannya sesuai metode yang kami gunakan dalam program kemitraan ini adalah *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, maka semua elemen pengelola MI Muhammadiyah (Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Salam Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Komite Madrasah, Stakeholder, Kepala Sekolah dan Guru) sudah terlibat, ini sesuai dengan komitmen warga madrasah untuk mewujudkan madrasah yang berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah Jagalan, hari selasa, tanggal 13 maret 2018, Jam 11.00-14.00 WIB.



(Kegiatan Forum Group Discussion PKM DRPM Ristekdikti 2018 di MI Muhammadiyah Jumoyo)

Program 2 : Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan

Sosialisasi SNP di MI Muhammadiyah dilaksanakan di MI Muhammadiyah Jumoyo. Dasar dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan sebuah persepsi dari masing-masing MI Muhammadiyah tentang pentingnya mutu dokumen dalam menghadapi akreditasi yang pada akhirnya berdampak pada penyamaan persepsi dalam menjalankan madrasah sebagai wadah pengembangan pendidikan. Kegiatan ini

mengupas tentang a) manual mutu pada SD/MI, b) pedoman pemenuhan standar mutu di satuan pendidikan, c) pengenalan SNP, SPM, dan SPMP untuk perencanaan sekolah/madrasah, d) perangkat akreditasi 2017 kerjasama dengan dewan pengawas madrasah kemenerian agama Kabupaten Magelang. Adapun target yang dicapai : a) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra tentang SNP, b) meningkatnya dokumen mutu dan teradministrasikan dengan baik. Kegiatan ini berlangsung pada hari senin, tanggal 09 April 2018, jam 11.00-14.00, dengan jumlah peserta 30 orang (Guru MI Muhammadiyah Jumoyo dan Jagalan, Delegasi Pimpinan Cabang dan Ranting Majelis Dikdasmen Kecamatan Salam, Kemite Madrasah dan *Stakeholder*).



(Gambar 1. Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Bagi Madrasah)



(Gambar 2. Pendampingan Penyusunan Dokumen Mutu oleh TIM PKM DRPM Kemenristekdikti dan Pengawas dari Kementerian Agama)

Program 3 : Pendampingan Pembuatan APE bagi Guru Madrasah.

Pendampingan pembuatan alat peraga edukatif dilaksanakan di MI Muhammadiyah Jagalan. Dasar dari pendampingan ini adalah untuk membangkitkan semangat mengajar bagi siswa sesuai dengan tujuan media pembelajaran; a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik, b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, c) Mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah, d) Mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih bergairah. Sehingga pendampingan dilakukan untuk kebermanfaatannya dan memunculkan rasa imajinasi guru yang harus dikembangkan. Kegiatan ini diawali dengan presentasi oleh tim PKM mengenai a) pengertian APE, b) cara pembuatan yang diawali dengan guru membuat proposal pengajuan APE kepada Tim PKM, c) evaluasi APE dan d) luaran akhir berupa katalog dan media APE. Adapun target yang dicapai; Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber media pembelajaran berbasis PAIKEM dan kearifan lokal. Kegiatan ini berlangsung pada hari senin, tanggal 11 April 2018, jam 11.00-14.00, dengan jumlah peserta 15 orang (Guru MI Muhammadiyah Jumoyo dan Jagalan).



(Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Alat Peraga Edukatif (APE))



(Gambar 4. Alat Peraga Edukatif oleh Guru MI)

Program 4 : Pelatihan Pengembangan Metode Pembelajaran Bagi Guru MI.

Program pelatihan ini dilaksanakan guna memberikan tambahan pengalaman belajar mengajar dengan metode inovatif bagi guru madrasah, yang dilihat dari strategi, metode, teknik, taktik dan pendekatan pembelajaran yang pada akhirnya para guru bisa menemukan model mengajar yang baik dan menyenangkan sesuai dengan konsep *student center learning*. Adapun target yang dicapai adalah guru madrasah bisa mengenal teori strategi pembelajaran (*Based Learning Problem, Cooperative Learning, PAIKEM, Inquiry Learning, Direct Learning, dll*). Adapun kegiatan ini diawali dengan seminar presentasi pemateri kerjasama dengan fasilitator nasional, dilanjutkan dengan praktik strategi pembelajaran dengan menggunakan media APE hasil program sebelumnya. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 21 Juli 2018, jam 08.00-14.00).



(Gambar 5. Pelatihan Metode Picture and Picture)

Dari empat program kegiatan tersebut diatas, memberikan korelasi yang baik dalam proses pelaksanaan pengabdian PKM DRPM Kemenristekdikti 2018, dimana kegiatan yang diawali dengan forum group discussion, sosialisasi SNP, pendampingan pembuatan APE, diakhiri dengan pelatihan metode pembelajaran menjadi titik tolak pendukung proses pembelajaran guna mencapai mutu pendidikan yang berkualitas di Madrasah Ibtidaiyah khususnya MI Muhammadiyah Jagalan dan Jumoyo Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

KESIMPULAN & SARAN

Adapun kesimpulan yang dapat dideskripsikan : 1) kemampuan dalam pemahaman dan aplikasi tentang SNP masih rendah, dengan adanya program sosialisasi terdapat peningkatan dalam implementasi SNP dalam menghadapi sistem mutu dalam akreditasi sekolah/madrasah, 2) program pendampingan pembuatan APE dapat membantu para guru dalam mempermudah proses pengajaran dikelas, 3) program seminar strategi pembelajaran guna perbaikan gaya mengajar guru di madrasah sangatlah membantu guru untuk selalu berinovasi dan berkreasi guna memberikan pengajaran yang lebih baik.

Adapun saran yang dapat dideskripsikan : 1) Kepala sekolah, guru, komite madrasah, stakeholder, dan PCM Kecamatan Salam harus menjadi teamwork untuk mewujudkan madrasah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Agus. 2014. Modul Participatory Action Research (PAR), Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing. Surabaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel
- Joyce., B., Weil, M., & Shower, B. 1992. *Models of teaching (4 th ed)*. Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall.
- Kustandi, C. dan Sutjipto, B., 2011. *Media Pembelajaran: Manual dan Digital*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Komara E., 2014. *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*, Bandung: PT Refika Aditama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru.